

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan zaman yang semakin maju menyebabkan terjadinya peningkatan pada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang meningkat tentunya membutuhkan adanya peningkatan pada sektor pembangunan, karena pembangunan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan dalam suatu negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea keempat tentang tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa...". Perwujudan dari tujuan-tujuan tersebut membutuhkan adanya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaik mungkin yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pembangunan di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor, membangun kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang berkualitas. Berdasarkan pada beberapa tujuan pembangunan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan pada turunnya angka kemiskinan masyarakat di suatu negara. Berikut adalah data kemiskinan di Indonesia berdasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada periode 2015-2019.

Tabel 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2015-2019

Tahun	Semester 1	Semester 2	Total
2015	11,22 %	11,13 %	11,18 %
2016	10,86 %	10,70 %	10,78 %
2017	10,64 %	10,12 %	10,38 %
2018	9,82 %	9,66 %	9,74 %
2019	9,41 %	9,22 %	9,32 %

Sumber: BPS Persentase Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2019 (diolah)

Berdasarkan pada tabel persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2019 persentase kemiskinan penduduk di Indonesia mengalami penurunan setiap tahun. Penurunan pada tingkat kemiskinan secara nasional tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Adanya kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Adapun berdasarkan pada perhitungan jumlah penduduk miskin di salah satu provinsi di Indonesia, berikut adalah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2019.

Tabel 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019

Tahun	Semester 1	Semester 2	Total
2015	13,32 %	13,27 %	13,3 %
2016	13,19 %	13,01 %	13,1 %
2017	12,23 %	11,32 %	11,78 %
2018	9,67 %	10,8 %	10,24 %
2019	10,58 %	11,41 %	11 %

Sumber: BPS Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019 (diolah)

Berdasarkan pada tabel persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2019 persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah hampir selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2018 persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami penurunan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan kurang lebih sebesar 0,2% setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah kembali naik sebesar 0,76% yang menyebabkan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 11%. Adapun berdasarkan pada perhitungan jumlah penduduk miskin di salah satu karesidenan di Provinsi Jawa Tengah, berikut adalah persentase kemiskinan di Karesidenan Pati pada periode 2015-2019.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Karesidenan Pati Tahun 2015-2019

Tahun	Pati	Grobogan	Blora	Rembang	Kudus	Jepara
2015	11.95 %	13.68 %	13.52 %	19.28 %	7.73 %	8.50 %
2016	11.65 %	13.57 %	13.33 %	18.54 %	7.65 %	8.35 %
2017	11.40 %	13.30 %	13 %	18.40 %	7.59 %	8.12 %
2018	9.90 %	12.30 %	11.90 %	15.40 %	6.98 %	7 %
2019	9.46 %	11.77 %	11.32 %	14.95 %	6.68 %	6.66 %

Sumber: BPS Data dan Informasi Kemiskinan di Karesidenan Pati Tahun 2015-2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2019, keenam kabupaten yang tergabung dalam Karesidenan Pati mengalami penurunan jumlah setiap tahunnya dimana Kabupaten Pati berada pada posisi ke 3 dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 9.46 %. Secara berurutan persentase kemiskinan di Karesidenan Pati dari yang terendah secara berurutan adalah sebagai berikut: 1). Kabupaten Jepara (6,66 %), Kabupaten Kudus (6.68 %), Kabupaten Pati (9.46 %), Kabupaten Blora (11.32 %), Kabupaten Grobogan (11.77 %), Kabupaten Rembang (14.95 %). Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu bagian penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola negara yang berkewajiban untuk memberikan perubahan kepada masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera, namun dalam penyelenggaraannya terkadang menyebabkan kendala dan fenomena yang tidak sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. Program pemerintah yang telah direncanakan secara matang dan ideal pun terkadang mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya yang terkadang terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakat. Persamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan yang baik dan sesuai dengan harapan sehingga dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali kurang tepat sasaran, sehingga pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat seringkali dijadikan sebagai objek dalam proses pembangunan sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap aktivitas pembangunan yang berada di wilayahnya. Sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat merugikan karena pelaksanaan pembangunan seharusnya membutuhkan adanya kesamaan peran dalam proses pembangunan untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pelibatan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Proses persamaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk mengikutsertakan peran dan fungsi masyarakat dalam kebijakan pembangunan terutama yang berhubungan langsung dengan mereka, misalnya program-program pembangunan infrastruktur. Pembangunan merupakan suatu proses yang memiliki berbagai tahapan dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Saat ini pemerintah tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, namun dalam pelaksanaannya pemerintah seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur di daerah terutama di wilayah pedesaan. Kesulitan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan umumnya disebabkan oleh berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan pembiayaan sampai dengan ketidaksesuaian pembangunan infrastruktur yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan adanya solusi untuk dapat mengatasinya, salah satunya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki hak otonomi untuk mengatur, memerintah, dan mengurus pembangunannya sendiri untuk menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Desa adalah wilayah yang sangat penting karena sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di wilayah desa. Banyaknya masyarakat yang tinggal di desa membutuhkan adanya tata kelola pemerintah yang baik untuk mendukung terciptanya keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di wilayah desa bertujuan untuk menggali potensi untuk mengembangkan wilayah desa serta untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh desa.

Pembangunan desa sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan antara pembangunan di pedesaan dan pembangunan di perkotaan. Adanya kerangka yang jelas dalam pembangunan desa merupakan hal yang wajib ada untuk menentukan rencana pembangunan dalam jangka tertentu sehingga terdapat kesamaan gerak dan langkah dalam pembangunan desa dan pembangunan kota. Pembangunan desa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur

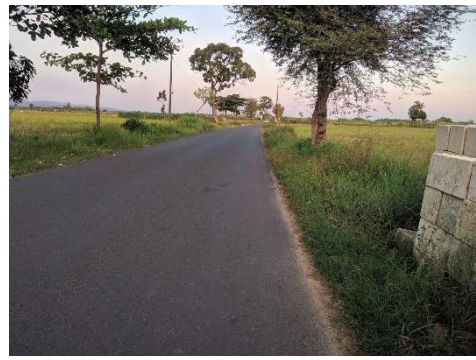
desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berasaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat gotong royong.

Kebutuhan masyarakat merupakan bagian yang diprioritaskan dalam pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan sebuah program pemerintah yang membutuhkan beberapa faktor dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan harus ada dalam pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai proses dan tahapan dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

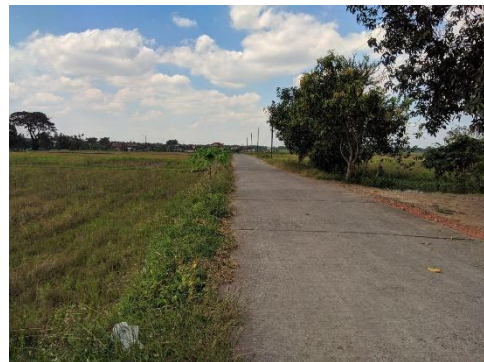
Pembangunan infrastruktur dalam lingkup desa memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tentunya memerlukan adanya strategi yang matang untuk memberikan kelancaran dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf hidup masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Adapun Kecamatan Pucakwangi terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Karangwotan, Desa Bodeh, Desa Kepohkencono, Desa Triguno, Desa Wateshaji, Desa Limbungmas, Desa Mojoagung, Desa Sitimulyo, Desa Kletek, Desa Terteg, Desa Mencon, Desa Pucakwangi, Desa Pelemgede, Desa Tanjungsekar, Desa Jetak, Desa Grogolsari, Desa Karangrejo, Desa Plosorejo, Desa Sokopuluhan, serta Desa Tegalwero. Berdasarkan pada hasil dokumentasi, berikut adalah kondisi pembangunan infrastruktur di beberapa desa yang terletak di Kecamatan Pucakwangi.

Gambar 1.1 Kondisi Infrastruktur Beberapa Desa di Kecamatan Pucakwangi



Kondisi Infrastruktur Jalan di Desa Bodeh



Kondisi Infrastruktur Jalan di Desa Kepohkencono



Kondisi Infrastruktur Jalan di Desa Triguno

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa kondisi pembangunan infrastruktur di beberapa desa yang terletak di Kecamatan Pucakwangi memiliki kondisi yang cukup baik. Kondisi pembangunan infrastruktur yang baik tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena

infrastruktur seperti jalan desa merupakan jenis infrastruktur yang sangat penting dan paling sering dimanfaatkan dalam menjalankan kehidupan masyarakat

Desa Karangwotan dipilih sebagai lokus dalam penelitian karena saat ini pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi infrastruktur jalan Desa Karangwotan yang banyak terjadi kerusakan di berbagai titik yang didokumentasikan sebagai berikut ini:

Gambar 1.2 Kondisi Infrastruktur Jalan di Desa Karangwotan



Gambar 2. Kondisi Infrastruktur Jalan di Desa Karangwotan

Berdasarkan pada gambar yang didokumentasikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada infrastruktur jalan di Desa Karangwotan. Kerusakan pada infrastruktur jalan desa tersebut menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat yang bergantung pada infrastruktur jalan desa. Desa Karangwotan sebagai sebuah desa yang mayoritas

masyarakatnya berprofesi sebagai petani tentunya terhambat dalam mengerjakan pekerjaannya karena akses jalan mereka dari rumah menuju area persawahan memiliki kondisi yang kurang baik. Kondisi tersebut membutuhkan adanya solusi yang tepat dalam menanganinya sehingga permasalahan infrastruktur yang belum terbangun secara optimal ini dapat terselesaikan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Adanya partisipasi masyarakat yang aktif merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan di Desa Karangwotan belum tercapai secara maksimal. Contoh dari kurangnya partisipasi masyarakat adalah pada saat pelaksanaan MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di Kantor Desa Karangwotan yang didokumentasikan dalam beberapa gambar berikut:

Gambar 1.3 Pelaksanaan MUSRENBANGDes Karangwotan



Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti

Berdasarkan pada gambar yang didokumentasikan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANGDes belum dihadiri oleh seluruh lapisan

masyarakat yang diundang. Ketidakhadiran masyarakat dalam menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, gagasan, atau saran dalam proses pembangunan sehingga dapat menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena pelaksanaan pembangunan membutuhkan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang optimal.

Berdasarkan daftar kehadiran peserta dalam MUSRENBANGDes, berikut adalah tabel kehadiran masyarakat dalam MUSRENBANGDes Karangwotan Tahun 2022:

Tabel 1.4 Kehadiran Masyarakat dalam MUSRENBANGDes

Kategori Peserta	Jumlah undangan yang dibagikan	Jumlah undangan yang hadir
Perangkat Desa	15	15
RT	27	20
RW	4	3
LPMD	10	5
BPD	9	5
Karang Taruna	5	2
Total	70	50
Persentase	100%	70%

Sumber: Pemerintah Desa Karangwotan

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANGDes Karangwotan belum berjalan secara maksimal. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya beberapa lapisan masyarakat yang belum dapat hadir memenuhi undangan untuk dapat memberikan ide, gagasan, atau usulan dalam pelaksanaan musyawarah yaitu sejumlah 20 individu atau setara dengan 30%.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat Desa Karangwotan tidak dapat tersalurkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Karangwotan. Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa dibutuhkan adanya beberapa hal yang harus terpenuhi, yakni:

- 1) Mengedepankan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam pembangunan desa.
- 2) Mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.
- 3) Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (RPJM dan RKP desa) secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat.
- 4) Tersedianya informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang dapat diketahui oleh masyarakat.
- 5) Adanya hak bagi masyarakat desa untuk memantau pelaksanaan pembangunan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengedepankan adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan desa. Adanya partisipasi yang aktif diharapkan dapat mencegah serta menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga akan mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan terutama dalam tahapan-tahapan dalam proses pembangunan infrastruktur yang terdiri dari beberapa tahapan seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan atau evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan (Yadav dalam Theresia, 2015:198). Kondisi pembangunan infrastruktur yang baik membutuhkan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat yang baik sangatlah dibutuhkan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa

Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta faktor penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.

Pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat merupakan fokus utama dalam penelitian yang disebabkan karena kedua variabel saling berkaitan satu sama lainnya. Kerusakan pada infrastruktur jalan desa merupakan sebuah permasalahan yang sangat merugikan karena dapat menghambat aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Terhambatnya aktivitas masyarakat yang disebabkan oleh kerusakan pada infrastruktur akan menyebabkan terjadinya penurunan pada kesejahteraan masyarakat yang dapat menyebabkan tujuan pembangunan nasional tidak tercapai dengan baik. Partisipasi masyarakat yang aktif merupakan salah satu faktor kunci untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur dengan menyamakan ide dan gagasan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan adanya kesamaan peran dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang optimal.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?
2. Apakah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?
3. Apakah faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
2. Untuk menganalisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.
3. Untuk menganalisis faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan memiliki sebuah manfaat dimana dapat mengatasi suatu fenomena yang dipilih dalam penelitian ini, yakni berbagai pihak yang memiliki korelasi secara langsung dengan penelitian seperti instansi terkait sebagai tempat penelitian serta perkembangan ilmu administrasi publik

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan konsep-konsep suatu penelitian yang berhubungan langsung dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa
2. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan hasil dalam penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah Desa Karangwotan dan menjadi acuan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa

2. Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Karangwotan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis (1)	Tahun (2)	Topik Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
Ananias Riyona Philip Jacob dan Tri Anggraini	2021	Penelitian berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Penfui Timur ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif tersebut tercermin pada partisipasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pembangunan desa
M.Wahyuddin, H. Mustari, dan Harna	2020	Penelitian berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pattaneteang termasuk dalam kategori tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pattaneteang yaitu faktor internal seperti

Penulis (1)	Tahun (2)	Topik Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
				usia, Pendidikan, dan kepemilikan harta benda. Sedangkan faktor eksternal berupa kepemimpinan pemerintah, fasilitas pendukung pembangunan, tingkat transparansi desa, dan lain sebagainya.
Samsu Rizal, Nurul Zuriah, dan Agus Tinus	2019	Penelitian berfokus pada pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Naru sangatlah tinggi. Wujud partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yakni berupa ide, gagasan, ataupun materi. Adapun permasalahan yang muncul adalah masyarakat tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa yang disebabkan oleh kesibukan lain seperti bekerja untuk mencari nafkah
Ismatullah dan Gerry Katon Mahendra	2021	Penelitian berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan serta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik. Adapun terdapat empat jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung

Penulis (1)	Tahun (2)	Topik Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
				meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat, serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat terdiri atas faktor ekonomi, faktor kesadaran, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor penghambat partisipasi adalah adanya sekelompok masyarakat yang memanfaatkan bahu jalan untuk kepentingan pribadi
Ajat Sudrajat dan Nurkolis	2022	Penelitian berfokus pada jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kidangpanjung Cililin Kabupaten Bandung Barat.	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kidangpanjung belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa partisipasi dengan uang, tenaga, pikiran, dan lain-lain
Herman	2019	Penelitian berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Ulidang Kecamatan

Penulis (1)	Tahun (2)	Topik Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
		Tammerodo Kabupaten Majene		Tammerodo partisipasi masyarakat Desa Ulidang cukup rendah yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Ulidang adalah kurangnya keaktifan masyarakat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan yang membahas pembangunan desa
Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, dan Mudiwati Rahmatunnisa	2020	Penelitian berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di beberapa desa di Kabupaten Bandung yaitu Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial, dan Desa Nanjung. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat, mengemukakan pendapat, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bentuk partisipasi masyarakat dari beberapa desa yang diteliti. Desa Magamukti merupakan desa yang memiliki kondisi partisipasi aktif. Adapun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang hanya berbentuk partisipasi kehadiran fisik saja terjadi di Desa Ciburial, sedangkan partisipasi ide dan gagasan saja tanpa kehadiran fisik terjadi di Desa Sayati dan Desa Nanjung. Ketiga bentuk partisipasi haruslah berjalan secara optimal untuk mendukung

Penulis (1)	Tahun (2)	Topik Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
				keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa
Kristyan Dwijosusilo dan Siti Shafiyah	2020	Penelitian berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam pembangunan infrastruktur yang sumber anggarannya berasal dari dana desa.	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Klobur sangat tinggi. Berdasarkan dari keempat tahapan dalam partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan), partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi sehingga pembangunan infrastruktur desa dengan memanfaatkan dana desa dapat berjalan secara optimal
Richard Djiko dan Remelia Dalensang	2021	Penelitian berfokus pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pitu dalam tahapan pembuatan keputusan kurang berjalan secara baik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam

Penulis (1)	Tahun (2)	Topik Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)
				bentuk pemikiran, materi, dan fisik masih sangat kurang. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sangatlah tinggi karena masyarakat Desa Pitu sangat antusias terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, meskipun terkadang pembangunan yang telah dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuhan mereka
Riyantii Samaun, Bala Bakri, dan Achmad Risa Mediansyah	2022	Penelitian berfokus pada upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo utara	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah dapat melakukan beberapa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan tersebut didukung dengan adanya faktor pendorong berupa adanya keterbukaan dan komitmen pemerintah desa untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa

Manfaat penelitian terdahulu terhadap penelitian saya adalah sebagai pedoman ataupun referensi yang bersumber dari metode penelitian dan hasil penelitian terdahulu dalam

melaksanakan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai tolak ukur yang peneliti gunakan baik dalam prosedur penulisan ataupun proses analisis dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitian. Adapun perbedaan penelitian yang peneliti buat dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian yang digunakan yaitu di Desa Karangwotan

1.5.1 Administrasi Publik

1.5.1.1 Definisi Administrasi Publik

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu. Konsep administrasi publik sejatinya telah ada dari dahulu kala yang di awal kemunculannya disebut sebagai administrasi negara. Menurut Dimock & Dimock (dalam Anggara, 2016:134) administrasi negara didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah serta cara mereka dalam memperolehnya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi negara mempersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana cara melakukannya.

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) mengartikan administrasi publik sebagai proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dwight Waldo (dalam Pasolong, 2017:9) mengartikan administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut Dimock & Dimock (dalam Anggara, 2012:134) administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Dimock & Dimock juga menambahkan bahwa administrasi negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang dikehendaki oleh rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya. Karenanya, ilmu administrasi administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Berdasarkan pada beberapa konsep administrasi publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses kerjasama yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah dalam organisasi publik dan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

1.5.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup atau cakupan dalam administrasi publik sangatlah kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik dalam suatu negara dapat dilihat dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementerian) dan non-departemen yang ada dalam suatu negara atau daerah (Chandler dan Plano dalam Keban, 2014:8) menjelaskan bahwa ketika permasalahan dalam kehidupan manusia semakin kompleks, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga akan semakin kompleks.

Ruang lingkup yang dinamis pada administrasi publik dapat dipelajari melalui berbagai literatur yang membahas secara khusus tentang administrasi public. Literatur yang ditulis oleh Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:8) menjelaskan beberapa ruang lingkup administrasi

publik yang dapat dilihat melalui berbagai unsur selain perkembangan ilmu administrasi publik, yakni:

1. Organisasi publik yang pada prinsipnya berhubungan dengan model-model organisasi dan perilaku organisasi
2. Manajemen publik yang berhubungan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran yang bersifat publik, serta manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi yang berhubungan dengan pendekatan terhadap kebijakan publik serta pelaksanaannya (implementasinya), privatisasi, administrasi antar pemerintah, serta etika birokrasi

1.5.1.3 Peran Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai *the work of government* memiliki pengaruh yang fundamental dalam suatu negara. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada literatur-literatur lama yang ditulis oleh beberapa pengarang seperti Karl Polanyi, Graham Sumner, Walter Wely, dan Friedrich A.Cleveland (Martin dalam Keban, 2014:15). Menurut pendapat Karl Polanyi berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung pada dinamika administrasi publik. Adapun menurut pendapat William Graham Summer, dinamika administrasi publik dapat menyebabkan sistem kenegaraan menjadi lebih buruk. Sependapat dengan William, Walter Wely berpendapat bahwa penerapan *shadow democracy* dalam suatu negara dapat menyengsarakan masyarakat. Berbeda dengan ketiga pendapat sebelumnya, Frederick A.Cleveland berpendapat bahwa administrasi publik memiliki peran yang fundamental dalam pemberdayaan masyarakat dan terciptanya demokrasi, Pendapat tersebut sejalan dengan Janet V.Denhardt dan Robert B.Denhardt (dalam Keban, 2014:16) yang berpendapat bahwa melalui pelayanan-pelayanan publik, administrasi publik berperan dalam menciptakan demokrasi. Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Rondinelli (dalam Keban.

2014:16) bahwa peran pemerintah kini harus diarahkan untuk mewujudkan *democratic governance* dan harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemanfaatan teknologi, penguatan institusi publik, partisipasi, peningkatan kapasitas, desentralisasi penyediaan layanan, pemberdayaan dan kemitraan publik-swasta.

1.5.1.4 Kegiatan Administrasi Publik

Menurut Keban (2014:17) kegiatan administrasi publik dibagi atas 2 (dua) kegiatan utama, yaitu kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik dapat dilihat melalui pelayanan sehari-hari di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, perizinan, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik dan pembangunan kualitas manusia untuk mengejar ketertinggalan, mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Kegiatan administrasi publik secara umum dapat diamati melalui kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga departemen atau non-departemen. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri oleh aparat pemerintah atau melibatkan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Adapun secara khusus, administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai implementasi kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pelayanan dan penyediaan barang-barang publik.

1.5.1.5 Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu selalu mengalami perkembangan yang dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma administrasi publik sebagai disiplin ilmu administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui peningkatan dalam berbagai bidang, sumber daya manusia dan keuangan. Nicholas Henry

(dalam Syafiie, 2006:27) menyatakan bahwa terdapat lima kelompok paradigma administrasi publik yaitu adalah :

- a. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh yang berperan di dalamnya adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow mengungkapkan bahwa paradigma ini menjelaskan ada pemisahan antara politik dan administrasi.
- b. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh yang berperan adalah W.F. Willoughby, L. Guillick dan L. Urwick. Fokus paradigma ini adalah administrasi publik, sedangkan lokusnya masih belum jelas.
- c. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Pada paradigma ini terjadi penentuan kembali akibat pertentangan antara perbedaan administrasi publik dengan ilmu politik yang pada prakteknya lokusnya adalah birokrasi pemerintahan tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Dalam paradigma ini mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin ilmu yang sangat dominan dalam administrasi publik.
- d. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Pada paradigma ini terjadi pengembangan teori organisasi dan ilmu manajemen. Ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus.
- e. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara. Pada paradigma ini fokus dan lokusnya sudah jelas, dimana fokusnya adalah kepentingan publik, urusan publik dan penentuan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah kepentingan publik.
- f. Paradigma Administrasi Publik sebagai Governance

Menurut Thoha (dalam Nugroho, 2018:11) Administrasi public berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dan Amanah. Perwujudan tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis dan sesuai dengan prinsip good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan adanya sinergi dari 3 (tiga) aktor utama dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah (sektor publik), swasta, dan masyarakat

Administrasi public sebagai governance memiliki power yang cukup besar dalam mendeskripsikan berbagai permasalahan yang bersifat modern. Administrasi public tidak hanya terbatas pada Lembaga public atau birokrasi, tetapi juga berbagai sektor organisasi lain yang utamanya berhubungan dengan kebijakan public. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa organisasi diluar sector public dapat diikutsertakan dalam implementasi kebijakan public. Berdasarkan pada beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi public sebagai governance memberikan perhatian penting pada kebijakan yang dimanfaatkan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan public

Thoha (dalam Nugroho, 2018:12) menjelaskan bahwa governance memiliki 3 dimensi yang terdiri dari dimensi Lembaga, dimensi nilai yang mendasari kekuasaan, dan dimensi proses. Dimensi Lembaga merupakan dimensi pertama dimana terdapat banyak pelaku dalam sistem administrasi sehingga terbentuk beberapa aturan lazim dalam birokrasi yang terdiri dari kemitraan, koproduksi, jejaring dan konsep koprovisi. Dimensi kedua merupakan nilai yang mendasari kekuasaan yang dilakukan melalui perwujudan efektivitas dan efisiensi administrasi public untuk kemudian dikembangkan democratic governance yang mengikutsertakan berbagai unsur seperti: informalitas, manajemen berbasis konsensus, kesetaraan, partisipasi, serta kontrak sosial. Dimensi terakhir atau dimensi ketiga yaitu dimensi proses yang mendeskripsikan unsur-unsur Lembaga untuk mengatasi masalah-masalah pada sektor public.

Penelitian ini berfokus pada paradigma ke 6 yaitu Administrasi Publik sebagai Governance dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perbedoman pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaannya.

1.5.2 Manajemen Publik

1.5.2.1 Definisi Manajemen Publik

Secara umum, manajemen merupakan sebuah kegiatan yang akan selalu ada di dalam organisasi terlebih pada organisasi publik. Menurut George R Terry (dalam Sukarna, 2011:3) manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh individu-individu dengan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun definisi manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:92) merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi serta pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Dalam organisasi publik, manajemen disebut juga sebagai manajemen instansi pemerintah atau manajemen publik. Menurut Overman (dalam Keban, 2014:92) Manajemen publik merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi-fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Dalam upaya mengendalikan dan menggerakkan sekelompok orang melalui kerja sama guna mencapai tujuan, setiap orang yang memimpin harus melakukan beberapa fungsi tertentu atau yang disebut fungsi manajemen.

1.5.2.2 Fungsi Manajemen Publik

Henry Fayol (dalam Batlajery, 2016:139) menyebutkan setidaknya semua manajer melaksanakan beberapa fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah,

mengkoordinasikan, dan mengendalikan dalam rangka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Sasaran dari perencanaan yakni untuk memberikan arahan yang jelas, mengurangi ketidakpastian dan pemborosan sumber daya, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.

c. Pengarahan

Pengarahan (*commanding*) adalah proses untuk menumbuhkan semangat dan motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan.

d. Pengkoordinasian

Menurut pandangan Henry Fayol, pengkoordinasian (*coordinating*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan agar kegiatan organisasi tetap bersinergi dengan baik.

e. Pengendalian

Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*). Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup empat kegiatan, yaitu (1) menentukan standar prestasi; (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini; (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi; dan (4)

melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

1.5.2.3 Paradigma Manajemen Publik

a. *Old Public Administration*

Woodrow Wilson (dalam Thoha, 2008:72-73) menjelaskan konsep pemerintahan dalam konsep *Old Public Administration* (disebut juga dengan *OPA*) memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pelaksanaannya dikerjakan dengan netral, professional, dan lurus menuju tujuan yang telah ditetapkan. Wilson menyebutkan bahwa terdapat dua tema kunci dalam memahami *OPA*, yaitu: 1). Adanya perbedaan antara politik dan administrasi yang berkaitan dengan akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kompetensi netral yang harus dimiliki oleh administrator. 2). Adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan managernya untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif

b. *New Public Management*

Organisasi sektor public seringkali divisualisasikan sebagai sebuah organisasi yang kaku, kurang inovatif, berkualitas rendah, dan beberapa kritikan lainnya yang akhirnya memunculkan adanya reformasi di sektor publik yang disebut dengan konsep *New Public Management (NPM)*. Konsep *New Public Service* secara historis awalnya diperkenalkan di Eropa pada antara tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya konsep administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*) (Mahmudi, 2010:33-34). Konsep *OPA* secara perlahan tergantikan oleh *NPM* karena dianggap mampu untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin besar supaya sektor publik dapat menghasilkan produk publik (barang/jasa) yang lebih berkualitas atau minimal setara dengan produk yang dihasilkan oleh sektor swasta.

c. *New Public Services*

Paradigma *New Public Services* atau *NPS* merupakan sebuah paradigma yang tercipta dan berlandaskan pada teori-teori yang menekankan nilai-nilai demokratis dan partisipasi warga negara. Thoha (2008:84) menyatakan bahwa ide dasar dari *NPS* dibangun dari konsep-konsep; (1) teori *democratic citizenship*; (2) model komunitas dan *civil society*; (3) organisasi *humanism*; (4) *postmodern* ilmu administrasi publik. *NPS* muncul sebagai respon terhadap ketidakseriusan *NPM* (*New Public Service*) dalam memperhatikan nilai partisipasi dan pendekatan partisipasi dalam administrasi public yang lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai dalam sektor swasta sehingga mendapatkan berbagai macam kritikan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan karena penerapan nilai-nilai swasta dinilai menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam praktik pelayanan birokrasi pemerintah karena lebih mendahulukan kewirausahaan daripada hak-hak masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Paradigma *NPM* yang melihat masyarakat sebagai *customer* dianggap kurang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ingin diwujudkan dalam birokrasi pemerintah, sehingga *NPS* terlahir (Denhardt dan Denhardt dalam Gedeona, 2010:310)

Paradigma *NPS* tidak memperlakukan warga (*citizen*) sebagai pelanggan dan konsumen (*customer dan consumer*), namun sebagai warga negara (*as citizen*) yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban pemerintah atas Tindakan yang diambil atau atas kegagalan dalam menjalankan kewajibannya. Warga negara juga mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, didengar suaranya, serta dihargai nilai dan perefensinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan warga negara sangatlah penting dalam pelaksanaan administrasi public di suatu negara yang didukung oleh dinamika perkembangan sistem

pemerintahan yang demokratis dan menyangkut nilai-nilai fundamental yang mendudukkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Paradigma ini berlandaskan pada teori demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga adanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu negara khususnya pada fokus penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

1.5.3 Partisipasi Masyarakat

1.5.3.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara umum dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok orang sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Definisi tersebut selaras dengan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa kamus dalam ilmu sosiologi. Bornby (dalam Theresia, 2015:196) mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan untuk mengambil bagian atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Adapun menurut Theodorson (dalam Theresia, 2015:196) partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan atau profesinya.

Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo dalam Theresia, 2015:196). Adapun menurut Beal (dalam Theresia 2015:196) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena adanya pengaruh yang tumbuh dari luar merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*).

Karakteristik dari proses partisipasi adalah semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karenanya, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (dalam Theresia. 2015:197) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan
- d. Adanya kepercayaan diri bahwa dia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan

Analisis yang dilakukan oleh Wolcook dan Narayan (dalam Theresia. 2015:197) tentang “modal sosial” (*social kapital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam “jejaring sosial” (*social network*)

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal tersebut berarti bahwa

partisipasi yang diberikan merupakan bentuk kesadaran bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakann oleh pemerintah sendiri, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki kualitas hidupnya

1.5.3.2 Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kajian tentang pengertian “partisipasi” yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan aktif dan sukarela yang disebabkan karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) ataupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yakni, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai.

Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-63) membedakan partisipasi masyarakat menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. partisipasi dalam perencanaan

- a. Partisipasi dalam perencanaan berkaitan dengan proses penentuan keputusan atau alternatif keputusan dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan, ide, atau saran yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat diwujudkan melalui sumbangan pemikiran atau gagasan, kehadiran dalam musyawarah atau rapat, serta memberikan respon atau tanggapan berupa penolakan atau persetujuan terhadap program yang disampaikan.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan jenis partisipasi berupa pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari tahap partisipasi dalam perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat secara banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan haruslah diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk peran serta lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan

Partisipasi dalam pemanfaatan merupakan partisipasi berupa pengambilan manfaat dari hasil pembangunan yang telah dicapai. Partisipasi dalam pemanfaatan seringkali disandingkan dengan partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan juga akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan seringkali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan administrator pembangunan. Permasalahan ini disebabkan karena mereka seringkali beranggapan bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan maka secara otomatis maka akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarnya.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada perencanaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan karena fokus pada pencapaian tujuan yang sesuai dengan harapan serta dilakukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan

pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam bidang ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan pembangunan serta penilaian masyarakat terkait pembangunan yang dilakukan.

1.5.3.3 Bentuk-bentuk Partisipasi

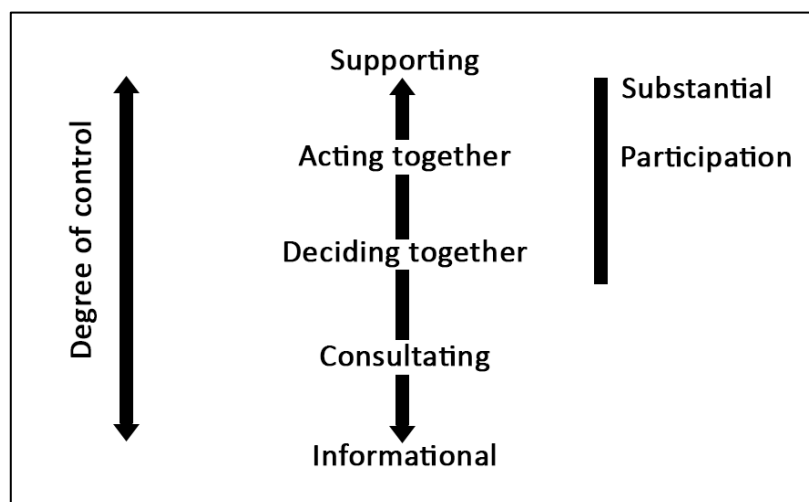
Dusseldorp (dalam Theresia, 2015:200) mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yakni:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

1.5.3.4 Tingkat Partisipasi

Wilcox (dalam Theresia, 2015:202) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) tingkatan atau tahapan dalam partisipasi.

Gambar 1.4 Jejaring Tingkat Partisipasi



1. Memberikan informasi (*informational*)
2. Konsultasi (*consulting*) yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*) yaitu memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*acting together*) yang berarti tidak hanya ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan

1.5.3.5 Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Sufian (2003:289) terdapat 4 langkah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Sumbangan Pemikiran Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan berarti bahwa masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam memberikan ide-ide, saran, gagasan atau pemikiran dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong

Sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong berarti bahwa masyarakat dan pengelola pembangunan dilibatkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan sumbangan tenaga masyarakat untuk bergotong-royong yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat

3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat

Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat berarti masyarakat dan pengelola pembangunan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk memberikan swadaya masyarakat berupa dana untuk mencapai pembangunan yang seoptimal mungkin dan sesuai dengan harapan masyarakat.

4. Memelihara hasil-hasil pembangunan

Memelihara hasil-hasil pembangunan berarti bahwa masyarakat dan pengelola pembangunan dapat memelihara dan menjaga hasil pembangunan yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.5.3.6 Syarat Tumbuhnya Partisipasi

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, namun dalam prakteknya partisipasi masyarakat terkadang tidak dapat terlaksana secara sungguh-sungguh.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Hal ini berarti bahwa

tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan (aparatur) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah hanya sekadar objek atau penikmat hasil pembangunan, namun juga merupakan subjek atau pelaku dalam pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Geertz (dalam Theresia, 2015:207) menyatakan bahwa penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali juga terhambat oleh persepsi yang kurang tepat yang menilai bahwa masyarakat “susah diajak maju”. Persepsi ini sebenarnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak memahami masyarakat. Sulitnya penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat dapat juga disebabkan karena masyarakat telah begitu lama “direkayasa untuk tidak terlalu berpikir” oleh penguasa (pemerintah). Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung lebih suka menerima apapun yang harus dilakukan/diinstruksikan dibanding harus ikut susah-susah berpikir, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan yang ditawarkan.

Slamet (dalam Theresia, 2015:207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yakni:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Adanya kesempatan yang diberikan merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Kesempatan untuk berpartisipasi

Dalam pelaksanaannya, terkadang banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi. Kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat tentang bentuk dan kapan dilaksanakannya partisipasi juga merupakan faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi. Berikut adalah beberapa kesempatan yang dimaksud dalam berpartisipasi:

- a. Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat birokrasi paling bawah
- b. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
- c. Kesempatan untuk memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya manusia (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk pelaksanaan pembangunan
- d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya
- e. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perizinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan
- f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, mengembangkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.

2. Kemampuan untuk berpartisipasi

Perlu diketahui bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Adapun kemampuan yang dimaksud adalah:

- a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya)

- b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

3. Kemauan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, meliputi:

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
- c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri
- d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan
- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya

Berdasarkan pada beberapa konsep tersebut, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui beberapa hal berikut ini:

- a. Pemberian kesempatan yang diberikan oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidupnya dan bukannya pemberian kesempatan yang dilandasi oleh prasangka buruk agar mereka tidak melakukan pengrusakan
- b. Pemberdayaan intensif dan berkelanjutan yang tidak hanya berupa penyampaian informasi tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini juga dibarengi dengan dorongan dan harapan-harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi

- c. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang besarnya manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat secara langsung dan atau tidak langsung dinikmati sendiri ataupun yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Perubahan pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah “biaya sosial” (*social cost*) yang merupakan pemborosan, namun merupakan “investasi sosial” (*social investment*) yang akan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang tak terbatas.

1.5.3.7 Permasalahan dalam Partisipasi Masyarakat

Soetrisno (dalam Theresia, 2015:211) mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat muncul dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Masalah utama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman tentang makna tentang partisipasi oleh pihak perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, berikut adalah perbedaan tersebut:
 - a. Pada tatanan perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat hanya berperan secara pasif dan hanya sebagai subordinasi pemerintah
 - b. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah
 - c. Partisipasi masyarakat yang didefinisikan sebagai Kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya subsistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

2. Masalah kedua adalah dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dan dijaga ketat yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi ini dapat menyebabkan reaksi balik berupa “budaya diam” yang menyebabkan tumbuhnya keengganan masyarakat untuk berpartisipasi karena dianggap asal beda (*waton suloyo*)
3. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi

1.5.4 Pembangunan Infrastruktur Desa

1.5.4.1 Definisi Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu perubahan secara berkelanjutan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk kemajuan dan perbaikan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pembangunan masyarakat sebagai pijakan dalam proses pembangunan diharapkan dapat mempercepat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut (Orocomna, 2013:3). Sondang P. Siagian (Orocomna, 2013:3) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan serta perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara dan bertujuan untuk mewujudkan modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pada era modern seperti saat ini, pembangunan merupakan hal yang sangat penting karena pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Todaro (2006:18) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan sosial.

Terdapat dua jenis pembangunan dalam suatu pembangunan, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan jenis pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. B.S. Muljana (2001:3) menjelaskan bahwa pada umumnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pembangunan fisik berupa infrastruktur. Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak dapat dilihat secara langsung, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan fisik dapat juga disebut sebagai pembangunan masyarakat atau pembangunan sosial, contohnya adalah pembangunan pada sektor ekonomi, kesehatan, ketertiban dan keamanan, dan pendidikan masyarakat.

1.5.4.2 Definisi Infrastruktur

Menurut *Oxford Dictionaries* (dalam Sidarto, 2018:1) infrastruktur merupakan struktur fisik dan organisasi dasar (berupa bangunan, jalan, atau energi) yang dibutuhkan dalam kegiatan/aktivitas masyarakat dan institusi. Berdasarkan pada definisi tersebut, para ahli membagi infrastruktur menjadi 7 kelompok infrastruktur, yaitu: transportasi (jalan, jalan raya, jembatan), pelayanan transportasi (bandara, pelabuhan, terminal), pengairan (saluran air, system pengairan, bendungan), pengelolaan limbah, bangunan, komunikasi, serta distribusi dan produksi energi (listrik dan lain-lain).

Adanya infrastruktur memberikan banyak manfaat dalam menopang pembangunan ekonomi dan sosial dalam suatu negara. Manfaat dari adanya infrastruktur, yaitu:

- a. Meningkatkan konektivitas antara wilayah atau antar negara
- b. Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara
- c. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya
- d. Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara
- e. Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau tersebut

Berdasarkan beberapa manfaat tersebut menunjukkan bahwa adanya pembangunan infrastruktur yang baik sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pembangunan infrastruktur yang kurang baik atau memadai akan berakibat buruk bagi suatu wilayah atau masyarakat, seperti: rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam memberantas kemiskinan, serta menurunkan kualitas dan daya saing terhadap wilayah lain. Dalam rangka percepatan pembangunan, setiap negara berupaya untuk terus menambah ketersediaan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.5.4.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan nasional, karena pembangunan desa memiliki cakupan yang sangat luas dan merupakan dasar dari sebuah pembangunan di suatu negara. Terdapat banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan yang optimal dalam pembangunan desa.

Adisasmita (2006:3) menjelaskan bahwa pencapaian tujuan merupakan acuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan desa, yaitu perwujudan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, mandiri, dan maju. Menurut *The World Bank* (1994:13) pembangunan infrastruktur dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Infrastruktur Ekonomi (*economic infrastructure*)

Merupakan sebuah infrastruktur yang berfungsi untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini meliputi *public utilities* (listrik,

gas, sanitasi, air bersih, telekomunikasi), *public works* (bendungan, irigasi, jalan), serta *transportation sector*.

b. Infrastruktur Sosial (*social infrastructure*)

Merupakan pembangunan infrastruktur yang bersifat sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur dalam tingkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa. Salah satu jenis pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat desa adalah infrastruktur jalan desa. Jalan merupakan salah satu jenis infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai sarana transportasi masyarakat dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya. Pembangunan infrastruktur yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Dengan berpedoman pada beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini fenomena yang dijadikan sebagai kajian oleh peneliti adalah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dimana terdapat beberapa aspek yang dijadikan sebagai indikator dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah untuk menentukan keputusan bersama. Perencanaan juga digunakan untuk melihat sejauh mana pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penentuan program pembangunan, serta melihat sejauh mana kontribusi pemikiran masyarakat

dalam bentuk usulan atau saran untuk pembangunan. Adapun fenomena dari perencanaan pembangunan yang akan diteliti antara lain:

- a. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Karangwotan
- b. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pemikiran (ide, saran, atau gagasan) dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Karangwotan
- c. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan di Desa Karangwotan

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam bentuk ini dapat dilihat melalui kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, barang, atau uang. Adapun fenomena dari pelaksanaan pembangunan yang akan diteliti antara lain:

- a. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam partisipasi tenaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan
- b. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam partisipasi barang yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan
- c. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam partisipasi uang yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan

3. Pemanfaatan Hasil

Pemanfaatan hasil merupakan perwujudan partisipasi berupa keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang telah selesai dikerjakan. Adapun fenomena dari pemanfaatan hasil pembangunan yang akan diteliti antara lain:

- a. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang telah dikerjakan
- b. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang telah dikerjakan

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan perwujudan partisipasi berupa keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan beserta hasilnya. Partisipasi masyarakat melalui evaluasi dapat dilakukan secara langsung (mengawasi dan menilai) dan secara tidak langsung (memberikan saran atau kritikan). Adapun fenomena dari evaluasi pembangunan yang akan diteliti antara lain:

- a. Melihat bentuk evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.

1.6.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah hal-hal yang menyebabkan masyarakat tidak terlibat atau tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Pada penelitian ini beberapa faktor penghambat seperti:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah

Beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat tersebut dipilih dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur karena kedua faktor penghambat tersebut dirasa memiliki relevansi yang tinggi dengan pokok permasalahan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan beberapa faktor penghambat lainnya.

1.6.3 Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses di mana masyarakat ikut serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembangunan yang terjadi di lingkungannya. Partisipasi masyarakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri, sekaligus meningkatkan kualitas dan keberhasilan proyek pembangunan. Pada penelitian ini beberapa faktor pendorong seperti:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Beberapa faktor pendorong partisipasi masyarakat tersebut dipilih dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur karena ketiga faktor pendorong tersebut dirasa memiliki relevansi yang tinggi dengan pokok permasalahan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan beberapa faktor pendorong lainnya.

Tabel 1.6 Operasional Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

KONSEP	OPERASIONAL	
	INDIKATOR	PEDOMAN WAWANCARA
Cohen dan Uphoff (1977) menjelaskan beberapa indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan Hasil, dan Evaluasi.	1. Perencanaan	1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Karangwotan 2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide, saran, atau gagasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Karangwotan

		3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan prioritas pembangunan di Desa Karangwotan
	2. Pelaksanaan	1. Apakah bentuk kontribusi masyarakat melalui partisipasi tenaga dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan 2. Apakah bentuk kontribusi masyarakat melalui partisipasi barang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan 3. Apakah bentuk kontribusi masyarakat melalui partisipasi uang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan
	3. Pemanfaatan Hasil	1. Apakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan? 2. Apakah bentuk partisipasi masyarakat dalam memelihara pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan?
	4. Evaluasi	1. Apakah terdapat evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan?
Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur	1. Kurangnya kesadaran masyarakat	1. Apakah masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur?
	2. Kurangnya sosialisasi pemerintah	2. Apakah terdapat sosialisasi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur	1. Adanya kesempatan partisipasi	1. Apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam

		pembangunan infrastruktur?
	2. Adanya kemauan berpartisipasi	1. Apakah masyarakat memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur?
	1. Adanya kemampuan berpartisipasi	1. Apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur?

1.7 Argumen Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu kegiatan dimana masyarakat turut serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, sehingga proyek tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat. Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan dasar untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, antara lain:

1. Masyarakat merupakan pengguna utama infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur desa, agar proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
2. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proyek pembangunan yang sedang dilakukan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pembangunan infrastruktur akan merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap proyek tersebut, sehingga lebih cenderung untuk memelihara dan mengelola infrastruktur yang telah dibangun dengan baik.

3. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas proyek pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan akan memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga proyek yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat.
4. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek pembangunan infrastruktur desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, maka proyek akan lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih efisien karena masyarakat akan memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola infrastruktur yang telah dibangun

Berdasarkan pada beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Adapun pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Karangwotan terindikasi masih rendah yang berakibat pada pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana secara optimal. Partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan faktor pendorong dan faktor penghambat sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pendekatan yang dimanfaatkan yakni deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang didapatkan oleh peneliti melalui subjek penelitian secara holistik dan dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan

dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi atau lokus yang dipilih dalam penelitian adalah Desa Karangwotan dan situs penelitian adalah Pemerintah Desa Karangwotan. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan terutama pada infrastruktur jalan desa yang terdapat banyak kerusakan di berbagai titik. Adapun jika dibandingkan dengan beberapa desa yang berada di sekitarnya, seperti Desa Bodeh, Desa Kepohkencono, dan Desa Triguno yang terletak di Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Pucakwangi, Desa Karangwotan memiliki kondisi pembangunan infrastruktur yang kurang baik pada infrastruktur jalan desa. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan melakukan analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di suatu Desa.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan beberapa informan yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memanfaatkan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti telah menentukan informan yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan informasi secara detail guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Khusus informan yang berasal dari masyarakat selaku subjek dalam partisipasi masyarakat ditentukan melalui *accidental sampling*, dimana penentuan informan dilakukan secara kebetulan atau tersedia di sebuah tempat sesuai dengan konteks penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah : Kepala Desa Karangwotan, Kepala Dusun Karangwotan, Bendahara Desa Karangwotan, serta beberapa masyarakat.

1.8.4 Instrumen Penelitian

Hardani (2020:116) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian dapat mengamati, menanyakan, mendengar, dan mengambil data penelitian secara mandiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber data, melaksanakan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, interpretasi data, serta membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya

Penelitian ini memanfaatkan beberapa instrumen penelitian, yaitu individu (peneliti) dan orang lain yang berkontribusi serta berperan sebagai perangkat dalam penelitian sekaligus pengumpul data. Terdapat juga instrumen penelitian lain berupa alat bantu dalam penelitian ini, seperti pedoman wawancara yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat mendukung instrumen kunci yakni peneliti. Kondisi tersebut menjadikan kehadiran peneliti bersifat wajib karena peneliti secara langsung berhubungan dengan lingkungan yang ada dalam bidang penelitian.

1.8.5 Jenis Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2012:157) jenis data dalam penelitian kualitatif bersumber dari kata-kata, tindakan, dokumen, serta sumber tertulis.

a. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan Tindakan merupakan sumber utama dalam penelitian kualitatif. Sumber data ini diperoleh melalui hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang didapatkan di lokasi penelitian. Dalam memperoleh data dalam penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan terkait topik penelitian yaitu analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

b. Sumber tertulis

Sumber tertulis dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti, buku, jurnal, ataupun internet.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber atau informan atau hasil dari observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan para informan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder secara umum dapat diperoleh melalui jurnal, dokumen, laporan, atau artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Dibutuhkan adanya ketelitian dalam menentukan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian, karena hal tersebut sangatlah penting untuk mencapai tujuan utama dalam suatu penelitian, yaitu untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Secara umum, observasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu perilaku dari manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam, dan responden. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan dan pengamatan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang diteliti sehingga dapat digunakan dalam menunjang proses penelitian. Sugiyono (2015:226) menjabarkan bahwa observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif.

Penelitian ini menggunakan model observasi partisipatif dalam melakukan pengamatan. Model observasi partisipatif dipilih karena observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti sehingga peneliti dapat ikut serta dan terlibat secara langsung dengan subjek atau objek penelitian yang diamati. Adapun subjek dan objek penelitian yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan

b. Wawancara

Secara umum wawancara didefinisikan sebagai sebuah Teknik pengumpul data dalam penelitian yang dilakukan melalui percakapan atau dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan. Tujuan dari adanya wawancara adalah untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dari informan. Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab/ Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:233) menyebutkan bahwa terdapat 3 macam

wawancara, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Metode ini dipilih karena dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur peneliti dapat menemukan permasalahan dalam penelitian secara lebih terbuka. Pelaksanaan wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat di Desa Karangwotan. Peneliti harus dengan teliti mencatat setiap detail dalam wawancara untuk mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan akurat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:240) Dokumentasi merupakan catatan tentang kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan sebuah Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumen yang berasal dari catatan-catatan, jurnal-jurnal, gambar, gambar, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2015:244) analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis dan penafsiran data dari tahapan awal merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Data yang didapatkan dari lapangan harus dengan segera dikumpulkan, disajikan dalam bentuk tulisan, serta dianalisis. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246) aktivitas

analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai. Terdapat 3 aktivitas utama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yakni:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merupakan sebuah kegiatan analisis data yang dilakukan dengan menentukan hal-hal utama yang penting dalam penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang ditulis secara terperinci untuk memudahkan proses reduksi data sehingga dapat diperoleh data-data yang penting dalam penelitian

b. Penyajian data (*Data Display*)

Merupakan aktivitas kedua yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yakni uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Adapun penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Merupakan aktivitas ketiga dalam pelaksanaan analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian dikategorikan, dicari tema, ditentukan pola, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kesimpulan yang didapatkan pada awal penelitian umumnya bersifat sementara dan masih dapat berubah lama penelitian masih berlangsung. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya.

1.8.9 Kualitas Data

Sugiyono (2015:267) menjelaskan bahwa penilaian keaslian data dalam penelitian lebih berfokus pada uji validitas dan reliabilitas. Sugiono juga mengemukakan bahwa untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa teknik, salah satunya adalah teknik

triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Agustinova (2015:47) mengemukakan bahwa triangulasi sumber data bertujuan untuk melakukan pengujian kredibilitas data yang dilakukan melalui verifikasi data yang didapatkan dari sumber-sumber data yang ada. Data yang telah diperoleh kemudian dikategorikan, dideskripsikan, dan tidak dapat dibentuk rata-rata seperti dalam penelitian kuantitatif. Setelah ditarik kesimpulan, langkah selanjutnya adalah mengajukan kesepakatan terhadap sumber-sumber data tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat menghasilkan data atau bukti yang berbeda serta memberi sudut pandang yang berbeda terkait fenomena yang diteliti. Berbagai sudut pandang tersebut dapat memberikan sebuah wawasan untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Triangulasi sumber data merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi sebuah kebenaran dari suatu informasi dengan memanfaatkan metode observasi, wawancara, atau dokumentasi.

Teknik triangulasi lain yang dimanfaatkan dalam pengujian validitas dalam penelitian ini adalah Teknik triangulasi metode. Agustinova (2015:49) mengemukakan bahwa triangulasi metode adalah sebuah metode dengan cara verifikasi data dari sumber yang sama, namun dengan perbedaan teknik. Peneliti dalam melakukan analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan berlandaskan lebih dari satu sumber data. Pengujian terhadap sebuah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi akan diperiksa Kembali dengan metode wawancara